

NASIONALISME INDONESIA DALAM PERUBAHAN MASA REFORMASI DAN TANTANGAN GLOBALISASI

Danar Widiyanta, Miftahuddin

Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas
Negeri Yogyakarta
danarwidiyanta@uny.ac.id, miftahuddin@uny.ac.id

Abstrak

Nasionalisme Indonesia masa kini sedang mengalami degradasi dengan meningkatnya konflik-konflik antar etnik, antaragama, dan fenomena disintegrasi bangsa lainnya. Ketahanan integrasi bangsa sedang diuji kehandalannya karena kelalaian sejarah. Masa orde lama, orde baru telah keliru merasionalkan persatuan secara empiris. Pemerintah tidak memberi kesempatan masing-masing kelompok etnik untuk mengekspresikan keleluasaannya dalam persatuan bangsa. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode sejarah yang memiliki empat tahapan kerja yaitu heuristic, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Kesimpulan yang didapat bahwa nasionalisme Indonesia yang berkembang sejak masa kolonial sampai sekarang telah mengalami beberapa tahap perubahan. Dari nasionalisme anti penjajahan pada masa kolonial, menjadi nasionalisme yang *nation oriented* pada masa orde lama, berubah pada nasionalisme dengan *state oriented* di masa orde baru. Di masa reformasi dan Era Global beberapa nilai Barat yang hendak dikembangkan ternyata tidak mendapat dukungan yang kokoh dari struktur sosial, ekonomi maupun politik. Di sisi lain banyak hal contoh dan kasus yang menunjukkan situasi ekonomi, sosial, dan politik tidak dapat disimpulkan sepenuhnya bersandar pada nilai asli domestik yang ada.

Kata Kunci : Nasionalisme, Indonesia, reformasi, globalisasi.

Abstract

Indonesian nationalism is currently experiencing degradation with increasing inter-ethnic, inter-religious conflicts and other phenomena of national disintegration. The resilience of national integration is being tested due to historical negligence. During the old order, the new order made a mistake in rationalizing unity empirically. The government does not give each ethnic group the opportunity to express its independence within national unity. The research method used is the historical method which has four stages of work, namely heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The conclusion obtained is that Indonesian nationalism, which developed from the colonial period until now, has experienced several stages of change. From anti-colonial nationalism during the colonial era, to nation-oriented nationalism during the old order, it changed to state-oriented nationalism during the new order. In the era of reform and the Global Era, several Western values that were intended to be developed did not receive strong support from social, economic or political

structures. On the other hand, there are many examples and cases that show economic, social and political situations that cannot be concluded completely based on existing original domestic values.

Keywords: *Nationalism, Indonesia, reform, globalization.*

PENDAHULUAN

Nasionalisme Indonesia sedang mejadi perbincangan hangat terkait dengan berbagai peristiwa berbau sara di tanah air. Nasionalisme merupakan konsep Barat yang berkembang di Indonesia sekitar awal abad ke-20 oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional. Nasionalisme merupakan konsep Barat yang dapat diterima dalam arti yang tepat oleh Masyarakat Indonesia (Denys Lombard, 2005 : 167). Munculnya nasionalisme di Indonesia dapat ditelusuri melalui sejarah panjang, ketika bangsa Indonesia mulai menyadari identitas nasionalnya dan menentang kolonialisme. Secara historis, nasionalisme Indonesia menarik untuk dikaji karena istilah nasionalisme ini mengalami pasang surut dalam pengertian politik maupun sosial.

Paham negara kebangsaan di Eropa lahir melalui proses Panjang dari masa *renaissance* hingga masa pencerahan. Revolusi perancis dipelopori oleh kaum nasionalis. Kaum nasionalis mengulingkan kekuasaan monarki dengan Prinsip *egalite, liberti* dan *fertinite*. Dengan slogan tersebut telah menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa mereka punya hak yang sama atas negara di samping tanggung jawab yang sama juga (Sutarjo Adisusilo, 2013 : 114). Pertumbuhan nasionalisme di Indonesia berbeda dengan Eropa. Konsepnya sama tetapi nuansa nasionalisme dibalut dengan anti kolonialisme. Sistem pendidikan Barat yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda membantu membangun intelektual dan elit lokal. Intelektual Indonesia yang belajar di Eropa mengalami perubahan pemikiran dan mulai mempertanyakan penjajahan serta mencari cara membangun nasionalisme bangsa. Terbentuknya kelompok-kelompok intelektual dan organisasi-organisasi politik seperti Budi Utomo (1908) dan Sarekat Islam (1912) memberikan wadah bagi para aktivis untuk berdiskusi dan mengembangkan gagasan nasionalis. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh merupakan puncak

dari gerakan nasionalis. Ini mengilhami semangat perjuangan dan menyatukan berbagai kelompok etnis dan agama di Indonesia. Setelah merdeka, tantangan berikutnya adalah membangun negara yang bersatu dan merumuskan identitas nasional Indonesia. Di Era Global sekarang, retorika nasionalisme sudah diganti oleh para politisi, pembisnis bahkan cendikia dalam kontek yang berbeda dengan konsep nasionalisme di awal kemerdekaan (Sri Ana Handayani, 2019 : 156). Perubahan inilah yang akan dikaji lebih mendalam dalam tulisan ini.

METODE

Kajian Nasionalisme Indonesia dalam Perubahan di era global merupakan kajian sejarah. Metode yang digunakan adalah metode sejarah. Metode sejarah Menurut Louis Gottschalk mempunyai empat tahapan kerja, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Nugroho Notosusanto, 1987 : 32).

Heuristik adalah aktifitas mencari dan mengumpulkan sumber-sumber Penelitian yang relevan. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Identifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber primer (dokumen asli, surat kabar, catatan pribadi) dan sumber-sumber sekunder (analisis, buku teks, artikel) yang relevan dengan topik penelitian. Langkah berikutnya adalah kritik sumber, di mana kritik sumber merupakan upaya untuk mempermasalahkan kesejatian sumber. Kritik meliputi kritik ekstern dan kritik intern. Selanjutnya adalah interpterasi, yaitu melakukan interpretasi terhadap fakta sejarah dengan menggunakan pendekatan sosial dan politik dan sejumlah paradigma untuk melihat masalah yang sedang diteliti. Kegiatan terakhir adalah pendiskripsian secara logis dan sistematis, data-data yang telah diolah secara analitis ke dalam bentuk tulisan (historiografi). Penerapan metode sejarah ini membantu membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang masa lalu dan dampaknya terhadap perkembangan dan identitas suatu masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nasionalisme dari Pergerakan Nasional hingga Orde Baru

Pemahaman berbangsa dan bernegara amat krusial di masa pergerakan nasional. Sebagai bangsa yang terjajah punya Prinsip bagaimana dapat bertahan hidup di negrinya sendiri. Kesenjangan Budaya antara penjajah dan masyarakat terjajah mengakibatkan pandangan yang berbeda dalam memahami bernegara. Bagi masyarakat terjajah yang feodal memandang kekuasaan itu abstrak dan penuh mitos. Pemerintah Kolonial Belanda menggunakan kekuasaan yang bersifat konkrit (Ben Anderson R.OG., 1986).

Para politikus humanis di awal abad ke-20, mulai memperhatikan kesejahteraan rakyat terjajah yang dianggap jauh dari kata sejahtera. Sejalan dengan desakan tersebut pemerintahan Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etik atau politik balas Budi. Untuk meningkatkan taraf hidup bumiputera dilaksanakan program irigasi, edukasi dan imigrasi. Program pendidikan berjalan cepat dan dapat diterima oleh masyarakat. Sentuhan Budaya cara berfikir Barat, telah membuka cakrawala baru untuk berfikir global. Cakrawala baru inilah yang menentukan perubahan berfikir masyarakat bumiputera untuk memahami arti sebuah kemerdekaan.

Munculnya golongan terpelajar, memegang peralihan penting dalam masa pergerakan nasional di Indonesia (Sartono Kartodirdjo, 1969 : 55). Bahasan tentang bangsa pada akhirnya menghimpun legitimasi bagi Sebuah perjuangan kemerdekaan. Kemerdekaan yang mengatasnamakan kepentingan seluruh masyarakat baik yang terpelajar maupun yang belum terpelajar. Nasionalisme, Indonesia, merdeka merupakan kosa kata yang banyak diserap para pelajar bumiputera di Belanda. Perkumpulan pelajar dengan nama Perhimpunan Hindia (*Indische Vereniging*) lahir di Belanda tahun 1908 (Akira Nagazumi, 1986: 136). Di Hindia Belanda baru segelintir orang yang memikirkan tentang nasionalisme salah satunya adalah Sukarno. Sarekat Islam, yang awalnya merupakan organisasi serikat buruh, berkembang menjadi organisasi yang memainkan peran penting dalam gerakan nasionalis dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Sumpah pemuda sebagai momentum kebersamaan telah mempermudah membumikan kata nasionalisme. Nasionalisme dipahami sebagai cinta tanah air dan terbebas dari kekuasaan asing (Dennys Lombard : 2005 : 168). Nasionalisme yang lahir pada

masa pergerakan nasional ini telah menjadi kekuatan besar sebagai proses kemunculan kesadaran nasional yang pada gilirannya menjadi gerakan massa yang anti kolonial (Alfian, 1996 : 34). Indonesia berhasil membentuk negara kebangsaan dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Pasca kemerdekaan, revolusi dan nasionalisme bergema untuk mengobarkan semangat mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan fisik melawan penjajah, baik oleh tentara Indonesia maupun rakyat, turut memperkuat semangat nasionalisme. Pengikut nasionalisme ini berkeyakinan bahwa persamaan cita-cita dapat diwujudkan dalam sebuah identitas politik dan kepentingan bersama dalam wadah yang disebut bangsa (*nation*). Pada awal kemerdekaan sampai tahun 1950 perkembangan nasionalisme Indonesia digambarkan dengan detail oleh George Mc Turnan Kahin dalam bukunya Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia (Kahin, 1995). Diplomasi politik oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta dalam perundingan internasional membantu memastikan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Pada akhir 1950-an Indonesia berhasil ke luar dari kemelut perjuangan bangsa melawan bangsa asing dengan jargon revolusi. Dalam perkembangan waktu, perpecahan antara Sukarno dan Hatta terjadi. Sukarno menginginkan nasionalisme tetap memerangi kolonialisme, liberalisme dan imperialisme. Kebijakan pemerintah lebih pada kebijakan politik memusuhi kolonialisme dan imperialisme asing. Masa Orde lama muncul yang disebut NASAKOM tiga pilar yaitu nasional, agama dan komunis dianggap akan mampu menangkal pengaruh imperialis Barat. Masa Sukarno dengan dalih revolusi belum selesai juga menyeret konflik dengan Malaysia sebagai bagian dari imperialisme Inggris.

Demokrasi Barat yang dipadukan dengan feodalisme Timur melahirkan demokrasi terpimpin. Kenyataannya aspek ekonomi terpinggirkan dalam pelaksanaan UUD 1945. Progres ekonomi dengan berdiri di atas kaki sendiri dan mengurangi peran Cina dalam ekonomi tidak terlaksana. Perubahan demi perubahan kekuasaan di era Orde Lama membawa bangsa Indonesia ke kemiskinan. Kemiskinan terjadi karena kondisi ekonomi dan politik yang tidak kondusif. Kondisi ekonomi yang makin memburuk, pertentangan ideologi yang semakin

komplek menyebabkan tragedy bangsa yang dikenal dengan Gerakan 30 September tahun 1965. Tragedi ini yang kemudian mengakhiri Orde Lama dan melahirkan pemerintahan Baru yang dikenal dengan Orde Baru.

Masa Orde Baru mengubah konsep revolusi belum selesai dengan konsep pembangunan. Pembangunan dilakukan dengan bertahap yang dikenal dengan Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Tujuan pembangunan untuk mengubah masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Pembangunan digaungkan dalam mengubah masyarakat Indonesia yang tradisional menuju masyarakat Indonesia modern. Pembangunan masa Orde baru bersifat sentralistik. Kebijakan sentralistik dilatarbelakangi, kekhawatiran terhadap persatuan nasional, sentralisasi dalam rangka memelihara keseimbangan politik dan keamanan, dan pengalaman sekitar 1965 memaksa pemerintah memegang kendali kebijakan ekonomi.

Masa Orde Baru di Indonesia (tahun 1966-1998) pemerintahan Presiden Soeharto memiliki kendali yang kuat atas kebijakan ekonomi. Pemerintah pusat, mengendalikan penuh atas kebijakan ekonomi dengan mengeluarkan keputusan-keputusan penting dan diimplementasikan di seluruh Indonesia. Pemerintah Orde Baru dalam pembangunan ekonominya berbasis sentral, dengan fokus pada industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pemerintah memiliki kendali dalam menentukan harga beberapa komoditas utama seperti beras dan minyak kelapa sawit. Kebijakan monopoli ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung petani. Masa Orde Baru mencatat pertumbuhan ekonomi yang signifikan, meskipun diiringi dengan kritik terkait otoritarianisme dan Korupsi Kolosi Nopotisme. Pemerintah menggunakan model pembangunan berbasis tumpang tindih di mana sektor-sektor yang saling terkait didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi.

Dalam kehidupan politik, pemerintahan Orde Baru memegang hegemoni yang sangat kuat. Pemerintahan Orde Baru didominasi oleh otoritas militer. Soeharto sendiri adalah seorang jenderal militer yang mengambil alih kekuasaan setelah G30S/PKI (Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1965. Pemerintahan Orde Baru didasarkan pada anti-komunisme yang keras. Soeharto memusatkan kekuasaan di tangan presiden, menghilangkan partai politik,

dan mendirikan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang diangkat langsung oleh presiden. Hal ini menghasilkan pemerintahan yang sangat sentralistik. Kebebasan politik dan pers dibatasi secara signifikan. Pemerintah mengendalikan media, membatasi kegiatan partai politik, dan menekan kritik terhadap rezim. Nasionalisme yang terbentuk berubah dari *nation-oriented* menjadi *state oriented*. Ideologi negara adalah Pancasila, yang digunakan untuk mendefinisikan nilai-nilai dan arah pembangunan nasional. Pancasila diresapi dengan nilai-nilai nasionalisme, agama, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Rasa kebangsaan dipupuk dengan Penataran P4, yang diberlakukan bagi seluruh bangsa Indonesia sejak duduk dibangku sekolah menengah. Kesetiaan terhadap negara harus ditunjukkan dengan kesetiaan pada pemimpin tanpa banyak pertimbangan. Nasionalisme era Orde Baru, tidak memberikan ruang yang bebas untuk kebebasan berpendapat. Nasionalisme diarahkan kepada kepatuhan terhadap pejabat, birokrat dan unsur atasan lain untuk keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Hegemoni pemerintahan selama rentang 30 tahun melahirkan ketidaknyamanan dan ketidakpatuhan dari generasi mudanya. Meskipun berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, model ekonomi masa Orde Baru juga diwarnai oleh kebijakan yang rentan terhadap korupsi, ketidaksetaraan, dan penindasan politik. Krisis moneter Asia pada tahun 1997 mengguncang ekonomi Indonesia. Kondisi ini memunculkan ketidakpuasan masyarakat, memicu demonstrasi besar-besaran, menuntut pengunduran diri Soeharto. Pada awal 1998, krisis ekonomi melanda Indonesia dan demonstrasi mahasiswa memicu keruntuhan rezim Orde Baru, membuka jalan bagi reformasi dan perubahan menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka. Reformasi disebabkan karena ruang demokrasi yang terbatas, eksplorasi rasa kebangsaan yang sangat berkurang. Krisis moneter 1998, telah melumpuhkan sendi perekonomian pemerintah Indonesia. Demonstrasi Nasional akhirnya berhasil menggantikan sistem orde baru dengan orde reformasi.

B. Reformasi dan Tantangan Globalisasi

Semangat reformasi mewarnai perbaikan sistem pemerintahan disesuaikan dengan perubahan zaman. Gerakan reformasi mengagendakan beberapa perubahan

mendasar di Indonesia. Agenda itu adalah : Adili Suharto dan kroni-kroninya, Laksanakan amandemen UUD 1945, hapuskan Dwi Fungsi ABRI, Pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya, Tegakkan supremasi hukum dan Ciptakan supremasi hukum (Sri Ana Handayani, 2019 : 166). Reformasi mengusung agenda demokrasi, dalam banyak hal juga menciptakan infrastruktur dan prakondisi yang kondusif bagi tumbuh kembangnya keindonesiaan melalui partisipasi. Kemampuan demokratisasi dalam menarik semua elemen nasional bersendikan partisipasi menjadi penentu penting. Penghapusan diskriminasi dan perluasan partisipasi menjadi penghubung yang sangat penting.

Nasionalisme era reformasi menghadapi tantangan Zaman yang berbeda dengan zaman sebelumnya. Di era globalisasi sekarang, zaman perkembangan teknologi gawai misalnya telah menciutkan dunia ke dalam sebuah dunia maya. Keadaan sekarang mengharuskan masyarakat Indonesia untuk memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi (melek teknologi). Kemajuan teknologi dunia harus diimbangi oleh nasionalisme, supaya tidak terjebak dalam perubahan nasionalisme itu sendiri. Tantangan masyarakat Indonesia dalam membentuk nasionalisme era reformasi berbeda dengan era sebelumnya. Tantangan di era global, adalah mewujudkan demokrasi di tengah gempuran teknologi canggih yang semakin menglobal.

Pemerintahan Jokowi mencanangkan Nawa Cita untuk merevolusi mental bangsa Indonesia. Nama "Nawa Cita" diambil dari bahasa Sansekerta yang berarti sembilan cita-cita. Ini adalah kerangka kerja yang mencakup sembilan prioritas kebijakan utama yang ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan Indonesia. Nawa Cita meliputi, revolusi mental, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberantasan korupsi, pemberdayaan desa, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, penguatan ekonomi nasional, penanggulangan kemiskinan dan Inddonesia sejahtera. Tujuan Nawa Cita agar bangsa Indonesia dapat mengikuti arus zaman tanpa tenggelam dalam kekuatan asing dunia. Instruksi presiden tahun 2016 tentang Gerakan nasional revolusi mental menyangkut Gerakan Indonesia untuk melayani, bersih, tertib, mandiri dan Bersatu. Tujuan utamanya adalah mengikis habis budaya birokrasi yang malas, budaya ingin dilayani, budaya

korupsi, dan meningkatkan budaya disiplin, Budaya kreatif dan sebagainya (Abdillah Toha, 2017: 6) Nawa Cita ingin mengubah dan memperbaiki karakter bangsa dengan sumber daya manusia yang andal dalam rangka memperkuat daya saing bangsa.

Proses globalisasi sedang melanda dunia yang digerakkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang melampaui batas ruang dan waktu. Tantangan dari globalisasi menyangkut beberapa hal di antaranya adanya ketidaksetaraan global, terkait kesenjangan ekonomi antar negara, pemiskinan dan marginalisasi di beberapa wilayah. Tantangan teknologi berdampak terhadap pekerjaan dan kehidupan sosial. Tantangan bangsa Indonesia adalah bagaimana membentuk nasionalisme yang dapat mengimbangi bahkan mengungguli kekuatan bangsa lain. Reformasi memang dapat membawa perubahan positif, tantangan globalisasi menunjukkan perlunya penanganan bersama dan kerja sama antarnegara untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul. Kemampuan negara dan pemerintah dalam merawat, mengelola dan memperbaharui nasionalisme menjadi faktor kunci kemana Indonesia akan menuju. Wawasan Pancasila, kesadaran nasionalisme itu mengandung nilai-nilai emansipatori (Yudi Latif, 2017 : 6). Rasa kebangsaan Indonesia dipandu nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat mengantisipasi tantangan dan menawarkan visi global tanpa meninggalkan kearifan lokal.

C. Revitalisasi Nasionalisme Indonesia

Nilai-nilai politik keindonesiaan mulai memudar dan terisi oleh kesadaran etnik yang meningkat serta komitmen keagamaan yang meningkat di wilayah tertentu. Nasionalisme dapat memainkan peran pokoknya yaitu sebagai ideologi yang mengatasi loyalitas dan solidaritas kebangsaan, juga sebagai mekanisme pertahanan terhadap ancaman eksternal (Moeljarto Tjokrowinito, 1998: 42). Spirit rasa kebangsaan Indonesia melemah disebabkan karena lemahnya visi kebangsaan dan adanya kekaburan mendasar dalam memandang keindonesiaan.

Melemahnya visi kebangsaan di Indonesia pada saat ini disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks. Visi kebangsaan adalah ide dan nilai bersama yang

membentuk identitas nasional, tujuan bersama, dan pandangan mengenai arah masa depan suatu negara. Adanya konflik politik dan polarisasi di kalangan elit politik dapat mengaburkan visi kebangsaan yang bersifat inklusif dan menyatukan. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang melebar dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidaksetujuan terhadap visi kebangsaan yang dianggap tidak adil. Korupsi dan kegagalan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang baik dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap visi dan misi negara. Perubahan cepat dalam konteks global dan modernisasi bisa menghasilkan ketidakpastian dan menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi nilai-nilai tradisional atau nasional Pendidikan yang kurang berhasil dalam mengajarkan nilai-nilai kebangsaan dan kewarganegaraan dapat menyebabkan kurangnya pemahaman dan identifikasi terhadap visi kebangsaan. Penyebaran informasi yang tidak akurat atau disinformasi melalui media sosial dapat memperburuk perpecahan dan mengaburkan visi kebangsaan yang seharusnya bersifat bersama.

Ben Anderson dalam ceramahnya bertajuk Nasionalisme Kini dan Esok di Jakarta tahun 1999 mengatakan bahwa kebesaran jiwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk sangat penting bagi kelanjutan bangsa ini (Kompas, 5 Maret 1999). Nasionalisme atau semangat kebangsaan Indonesia merupakan proyek Bersama yang harus diperjuangkan. Bangsa Indonesia harus mampu mengambil pelajaran dari beberapa negara yang hancur akibat warganya berjiwa kerdil.

Dalam tatanan kehidupan bernegara, kesadaran kewarganegaraan seolah-olah kurang mendapat tempat untuk tumbuh dan berkembang. Pemahaman kewarganegaraan sebagai konsep hukum, tidak memiliki kekuatan untuk mentransformasikan masyarakat menjadi suatu entitas politik yang modern dan demokratis. Meskipun UU No 62 Tahun 1958 telah diubah menjadi UU Kewarganegaraan N0 12 tahun 2006 namun pengaruh UU lama masih sangat kuat. Konstruksi pembeda WNI pribumi dan keturunan masih kuat berpengaruh dalam masyarakat. Dalam kontek keindonesian visi alternative yang layak dipertimbangkan yaitu *multicultural nationalism* (Will Kimlicka, 2000). Kymlicka menawarkan bentuk-bentuk hak minoritas seperti federalisme multibangsa, multikulturalisme imigran, pemberian hak perwakilan kepada kelompok minoritas

yang tidak terkategori. Model ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang dipersatukan oleh nilai-nilai bersama, sehingga terwujud suatu “*social and political ideal of togetherness in difference*” (John Rawls. 1971)

Nasionalisme sebagai sebuah penemuan paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia, paling tidak dalam seratus tahun terakhir. Tanpa nasionalisme, jalannya sejarah manusia mungkin akan sangat berbeda. Lahirnya gagasan dan budaya globalisme dalam dekade 1990-an, serta adanya teknologi komunikasi dan informasi yang sangat akseleratif, tidak serta merta mengakhiri pandangan nasionalisme. Adanya globalisasi memang membuat nasionalisme tidak semerbak seperti saat terbentuknya negara bangsa pasca PD II. Pola kehidupan dunia yang semakin menglobal, menyebabkan negara-bangsa dengan ciri teritorum, kontrol atas kekerasan, struktur kekuasaan dan legitimasi perlahan-lahan mulai kehilangan fungsi. Fenomena kehidupan sekarang sangat destruktif bagi agama dan kebudayaan dalam kaitannya dengan penekanan hedonism, pengejaran kesenangan di sini dan saat ini (*here and now*), penanaman gaya hidup ekspresif, Pengembangan narsistik dan tipe kepribadian egoistik (Mike Featherstone, 2001 : 270). Untuk Indonesia dalam menghadapi dunia luar harus selalu membina dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mempertahankan nasionalisme bangsa Indonesia diperlukan kesiapan, kegigihan dan fleksibilitas dalam mengelaborasi bentuk-bentuk nasionalisme yang relevan sesuai dengan tantangan zaman. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman budaya, suku, dan agama memiliki tantangan untuk membangun identitas nasional yang kuat dan inklusif. Politik identitas dan nasionalisme sering muncul dalam wacana politik dan masyarakat, terutama dalam konteks pemilihan umum seperti sekarang ini. Kebijakan dan retorika pemerintah serta kepemimpinan nasional dapat membentuk persepsi dan sikap terhadap nasionalisme. Peran masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah dan kelompok aktivis, diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai nasionalisme.

KESIMPULAN

Pengertian nasionalisme berkembang dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia. Pada masa pergerakan nasional, beberapa tokoh pergerakan berhasil memberi arti nasionalisme yang mengakar dengan tradisi lokal di Indonesia. Nasionalisme pada masa pergerakan dipahami sebagai lawan dari kolonialisme dan imperialisme. Pada masa kemerdekaan nasionalisme terus mengalami perubahan makna dari aslinya. Masa orde lama nasionalisme lebih menekankan pada pengertian revolusi belum selesai berkaitan dengan tumbuhnya demokrasi terpimpin dan penguasa tunggal. Masa orde baru nasionalisme lebih menekankan pada stabilitas politik bangsa Indonesia. Nasionalisme lebih bersifat kepada ideologi negara, di samping untuk membangun ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat.

Di Masa Reformasi dan era global, nasionalisme ditujukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tertuang dalam Nawa Cita. Nasionalisme juga dikaitkan dengan kewarganegaraan untuk mengatasi beberapa konflik yang terjadi di tanah air. Multikulturalisme kewarganegaraan dan politik identitas diharapkan mampu mempertahankan nasionalisme dewasa ini. Nasionalisme di era global adalah nasionalisme yang dapat memadukan pengaruh globalisasi namun tanpa meninggalkan kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisusilo, Sutarjo., 2013. *Sejarah Pemikiran Barat dari yang Klasik sampai Modern*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Alfian, Teuku. I., 1998. "Nasionalisme dalam Perspektif Sejarah" dalam *Jurnal Filsafat Pancasila* NO. 2 Th II Desember 1998.
- Featherstono, Mike., 2001. *Consumer Culture and Postmodernism*, London: Sage Publicatios.
- Handayani, Sri Ana. 2019. "Nasionalisme dalam Perubahan di Indonesia Adaptasi atau Transplatasi", dalam *Humaniora* Vol 1, No 2 Januari 2019.

- Kahin, George Mc Turnan., (1995). *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik nasionalisme dan revolusi di Indonesia*, Surakarta : UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan.
- Kartodirdjo, Sartono., 1968. “ Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial”, dalam *Lembaran Sedjarah*, No 4 Desember 1968.
- Kymlicka, Will., 2000. *Kewarganegaraan Multikultural*, Jakarta : LP3ES.
- Latif, Yudi. “Respon Idealisme Muda”, dalam *Kompas*, Selasa 28 Oktober 2017.
- Lombard, Denys., 2005. *Nusa Jawa : Silang Budaya Batas-batas Pembaratan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Nagazumi, Akira., 1986. *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*, Cambridge, Messachusetts: Harvard University Press.
- Tjokrowinito, Moeljarto., 1998. “Nasionalisme dalam Perspektif Politik”, dalam *Jurnal Filsafat Pancasila*, Yogyakarta : Gajah Mada Press.
- Toha, Abdillah., 2017. “Apa Kabar Revolusi Mental Jokowi?” dalam *Kompas*, Selasa 28 Nopember 2017.